

BPK Periksa Penyaluran BLT Dana Desa di Kabupaten Bima

Bima (Suara NTB)-

Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE mengingatkan seluruh Kepala Desa (Kades) agar menyalurkan Bantuan Langsung (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru saja melakukan pemeriksaan penyaluran BLT yang bersumber dari DD dengan memilih secara acak 55 dari 191 desa di Kabu-

paten Bima sebagai subjek pemeriksaan. "Penyaluran BLT bersumber dari DD baru saja diperiksa oleh BPK," katanya akhir pekan kemarin.

Bupati juga mengharapkan semua Kades agar senantiasa tertib dalam penataan administrasi. Kemudian mendata dengan baik dan tidak hanya menyelesaikan tanggung jawab dalam pengelolaan DD. "Yang lebih penting adalah bagaimana aspek perencanaan, penganggaran dan evaluasi kegiatan

dilaksanakan sesuai ketentuan," ujarnya.

Ia menambahkan alokasi DD bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Pemerintah Desa berdasarkan program-program prioritas. Pengelolaannya harus tetap mengutamakan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi serta efisiensi. "Melalui DD pembangunan yang direncanakan di Desa dapat dilaksanakan untuk kemakmuran masyarakat desa," pungkasnya. **(uki)**

BPK Periksa Penyaluran BLT Dana Desa di Kabupaten Bima

Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE mengingatkan seluruh Kepala Desa (Kades) agar menyalurkan Bantuan Langsung (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru saja melakukan pemeriksaan penyaluran BLT yang bersumber dari DD dengan memilih secara acak 55 dari 191 desa di Kabupaten Bima sebagai subjek pemeriksaan. Penyaluran BLT bersumber dari DD baru saja diperiksa oleh BPK, katanya akhir pekan kemarin.

Bupati juga mengharapkan semua Kades agar senantiasa tertib dalam penataan administrasi. Kemudian mendata dengan baik dan tidak hanya menyelesaikan tanggung jawab dalam pengelolaan DD. Yang lebih penting adalah bagaimana aspek perencanaan, penganggaran dan evaluasi kegiatan dilaksanakan sesuai ketentuan, ujarnya.

Ia menambahkan alokasi DD bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Pemerintah Desa berdasarkan program-program prioritas. Pengelolaannya harus tetap mengutamakan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi serta efisiensi. Melalui DD pembangunan yang direncanakan di Desa dapat dilaksanakan untuk kemakmuran masyarakat desa, pungkasnya. (uki)